



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Pemerintah Kota Tarakan**

Jl. Kalimantan No.1 SKIP
TARAKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu Wa Ta'aala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Kota Tarakan yang memiliki visi mewujudkan Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat Sejahtera tentunya memiliki tantangan sekaligus peluang yang besar dalam mengembangkan infrastruktur dan ekosistem digital untuk

mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik kepada Masyarakat.

Dalam Renstra ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan selama periode 2025-2029 dengan fokus utama adalah meningkatkan tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik melalui penyelenggaraan digitalisasi layanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan layanan call center 112, memperkuat keamanan informasi dan persandian serta mengembangkan layanan statistik terpadu yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan arah kebijakan yang jelas bagi pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian serta membawa manfaat bagi seluruh Masyarakat Kota Tarakan.

Tarakan, September 2025

Kepala Dinas

ENDAH SARASTININGSIH, S.Pd, M.Pd

NIP. 197010251994012001

Pembina / IVa



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- IV / 243 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2029

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencanan Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- c. menyiapkan dan Menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
- d. menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 April 2025

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIROL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- IV / 243 /2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2029

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Ketua
II	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sekretaris
III	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Natal Palalangan, ST - Pengelola Kepegawaian 4. Nadya Octa Maryati, SE - Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 5. Eka Adria Wahyuni, SE – Bendahara 6. Rini Oktoviyanti – Pengadministrasi Umum	Kelompok Kerja Bidang Sekretariat
IV	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Sugiatmoko, ST - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 3. Hasnia, A.Md – Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi 4. Hafsah, SE – Analisis Publikasi	Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
V	1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika 2. Mujiono, SE., M.Cs - Pranata Komputer Ahli Muda 3. Yudi Dwihananto, S.Kom – Pranata Komputer Ahli Muda 4. Muh. Rusli, S.Kom – Pranata Komputer Ahli Muda 5. Suardi, A.Md – Pengelola Database 6. Yacholina Arni Tandi, SE – Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	Kelompok Kerja Bidang Aplikasi Informatika

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	7. Cornelius Yudhara P, A.Md – Pengelola Sistem dan Jaringan 8. Ade Sagita, S.Kom– Pranata Komputer Ahli Pertama	
VI	1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian 2. Rakhmat Kurniasi, ST - Sandiman Ahli Muda 3. Hj. Irma, ST – Analis Statistik	Kelompok Kerja Bidang Statistik dan Persandian
VII	1. Kepala UPT Tarakan Command Center 2. Kasubbag Tata Usaha TCC 3. Sumedya Mardiyono, SE – Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kelompok Kerja UPT Tarakan Command Center

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIROL

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/HK-IV/243/2025	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan	8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	10
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	46
e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian	48
Pelayanan	
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	50
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	50
b. Isu Strategis.....	53

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra DKISP Kota Tarakan	56
Tahun 2025-2029	
2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	60
dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DKISP Tahun 2025-2029	
a. Strategi	60
b. Penahapan Renstra.....	61
c. Arag Kebijakan	63

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program	65
2. Uraian Kegiatan.....	67
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator	75
Target dan pagu indikatif	
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.....	104
Renstra DKISP Tahun 2025-2029 melalui IKU dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2029-2030 melalui IKK	

BAB V PENUTUP	107
---------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai	20
Tabel 2.2 Jumlah Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak	21
Tabel 2.3 Daftar Inventaris Barang Dinas Komunikasi,	22
Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2024	
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
DKISP Tahun 2020 - 2024	
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	30
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan	
Tabel 2.6 Target dan Realisasi O{D yang terkoneksi bandwidth	33
Server Tahun 2020-2024	
Tabel 2.7 Target dan Realisasi Anggaran Bandwith Tahun 2020-2024...	34
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Media Layanan Informasi Publik	35
Tahun 2020-2024	
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan Informasi	36
Publik Tahun 2020-2024	
Tabel 2.10 Target dan Realisasi OPD yang berkontribusi terhadap	38
Penyediaan data sektoral Tahun 2020-2024	
Tabel 2.11 Target dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Statistik	39
Sektoral Tahun 2020-2024	
Tabel 2.12 Target dan Realiasi Aplikasi Layanan Publik.....	40
Tahun 2020-2024	
Tabel 2.13 Target dan Realiasi Anggaran Aplikasi Layanan Publik	40
Tahun 2020-2024	
Tabel 2.14 Target dan Realiasi Nilai LHE SAKIP Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 2.15 Perbandingan antara anggaran dan realisasi serapan	44
DKISP Tahun 2020-2024	
Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan Pelayanan DKISP Kota Tarakan.....	51
Tabel 2.17 Isu Strategis DKISP Kota Tarakan	55
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DKISP Tahun 2025-2029	59

	Halaman
Tabel 3.2 Rumusan Strategi.....	60
Tabel 3.3 Penahapan Renstra DKISP.....	62
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra DKISP Tahun 2025-2029	63
Tabel 4.1 Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029	69
Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029	76
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan DKISP Kota Tarakan Tahun 2025-2029	89
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	101
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DKISP Kota Tarakan Tahun 2025-2029	105
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Outcome DKISP Kota Tarakan	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika. Statistik dan Persandian	12
Gambar 2.2 Grafik Jumlah Pegawai	20
Gambar 2.3 Grafik Kualifikasi Pendidikan ASN	21
Perangkat Daerah	
Gambar 2.4 Grafik Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak	22
Gambar 2.5 Grafik Realiasi Anggaran Bandiwidth Server	33
Tahun 2020-2024	
Gambar 2.6 Grafik Perbandingan Target dan Realiasi Anggaran	34
Bandwidth Tahun 2020-2024	
Gambar 2.7 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran	36
Media Layanan Informasi Publik Tahun 2020-2024	
Gambar 2.8 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi OPD yang.....	38
berkontribusi terhadap Penyediaan data sektoral Tahun 2020-2024	
Gambar 2.9 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran	39
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2020-2024	
Gambar 2.10 Grafik Perbandingan Target dan Realiasi Anggaran	42
Aplikasi Layanan Publik	
Gambar 2.11 Grafik Realiasi Nilai LHE SAKIP Tahun 2020-2024	43
Gambar 2.12 Grafik Persentase Realisasi Serapan Anggaran	45
Tahun 2020-2024	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra ini memiliki nilai strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan penguatan tata kelola data daerah.

Revolusi digital dan transformasi teknologi yang terjadi secara global telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara fundamental. Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor publik menjadi keniscayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki peran sentral sebagai leading sector dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Tarakan.

Pada dasarnya bahwa penyusunan dokumen Renstra OPD yang jenjang perencanaannya selama 5 tahun merupakan suatu kewajiban Kepala OPD selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tahun 2025 – 2029 untuk periode 5 tahun kedepan merupakan perencanaan jangka menengah, karena memuat tentang penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa lima tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan dan Propinsi. Namun demikian substansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya dan potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan atas evaluasi pembangunan dan isu-isu strategis yang mengemuka dan berkembang.

Muatan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 berisi kebijakan keuangan organisasi, kebijakan umum, dan program pembangunan daerah yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pengertian indikatif menunjukkan bahwa informasi yang ingin dicapai tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampaknya tercantum didalam Renstra ini dan sifatnya fleksibel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur piker tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun

berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMN serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tertera dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 05-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 45);
28. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
29. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tarakan *Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025–2029 adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Program Prioritas sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025 -2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

3. Sebagai Dasar Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra DKISP Kota Tarakan Tahun 2025-2029
2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DKISP Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator dan Pagu Indikatif
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan Renstra DKISP Tahun 2025-2029 melalui IKU dan Targetkinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2029-2030 melalui IKK

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1) Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

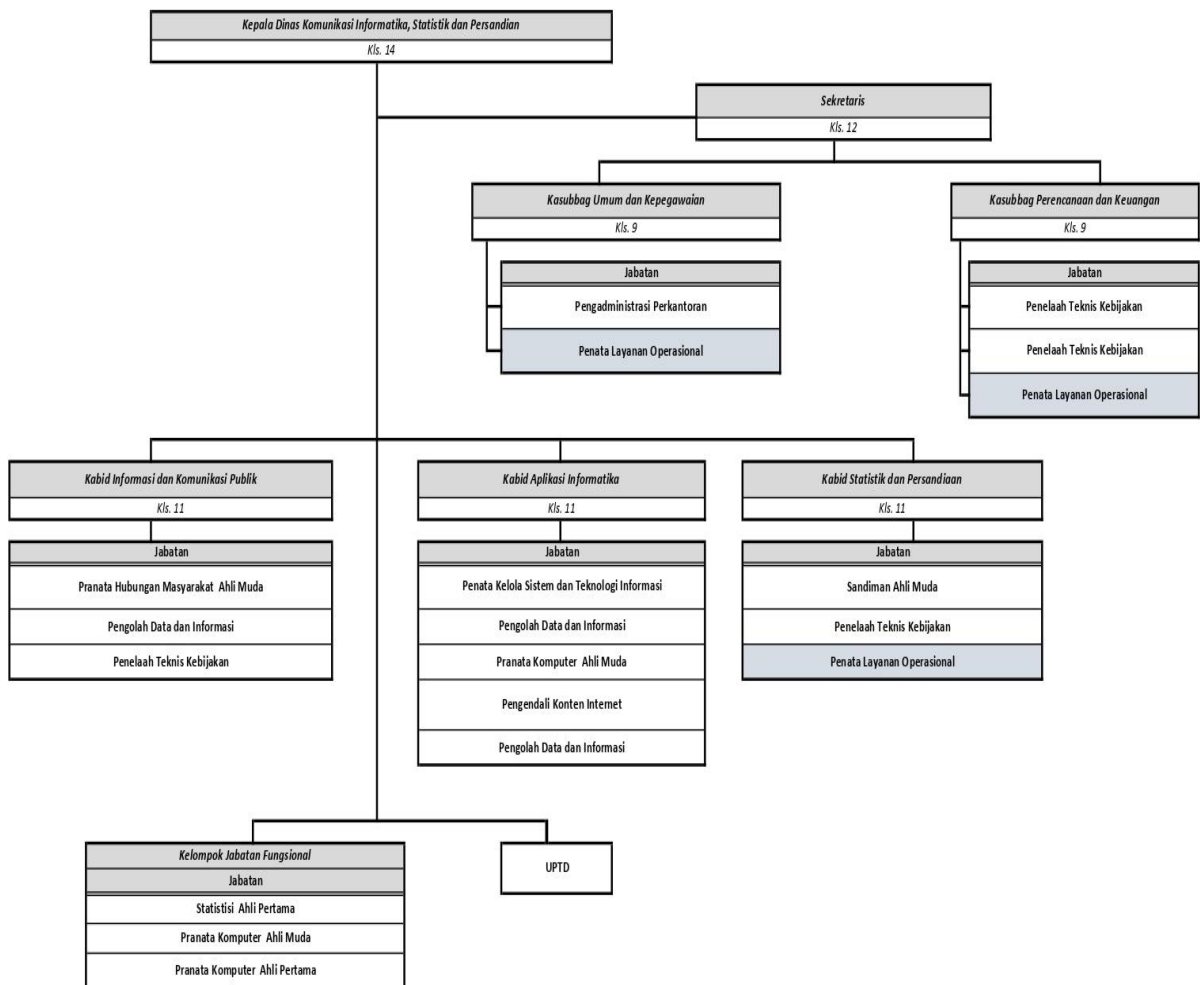
Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan urusan wajib, yang dapat diartikan bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, namun wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

3) Struktur Perangkat Daerah

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu)

Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



4) Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

b) Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas .

Sekretariat dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Dinas;
2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

c) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. monitoring opini dan aspirasi publik;
3. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. pengelolaan media komunikasi publik;
5. pelayanan informasi publik;
6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
7. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
8. layanan hubungan media;
9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
10. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
11. manajemen komunikasi krisis;
12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
14. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Aplikasi Informatika

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city*;
4. Pengelolaan *E-Government* dilingkup Pemerintah Daerah;
5. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
6. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada bidang Aplikasi Informatika

e) Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) UPT *Tarakan Command Center (TCC)*

Dasar pembentukan UPT *Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

1. UPT *Tarakan Command Center* merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .
2. UPT *Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .

UPT *Tarakan Command Center* mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas UPT *Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan layanan *call center 112*
4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan *call center 112*
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya

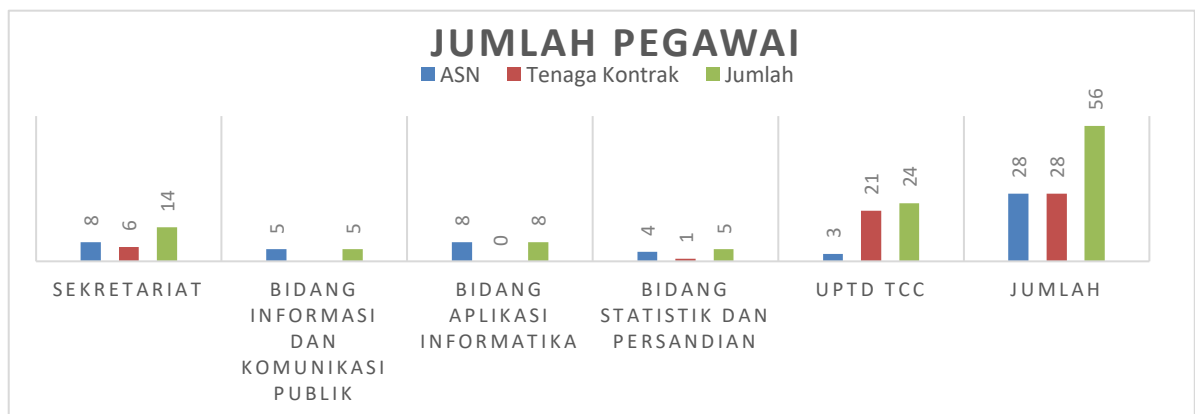
berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan. Sumber daya aparatur yang ada sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
a. Sekretariat	8	6	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	8	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	4	1	5
e. UPT TCC	3	21	24
Jumlah	28	28	56

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Pegawai



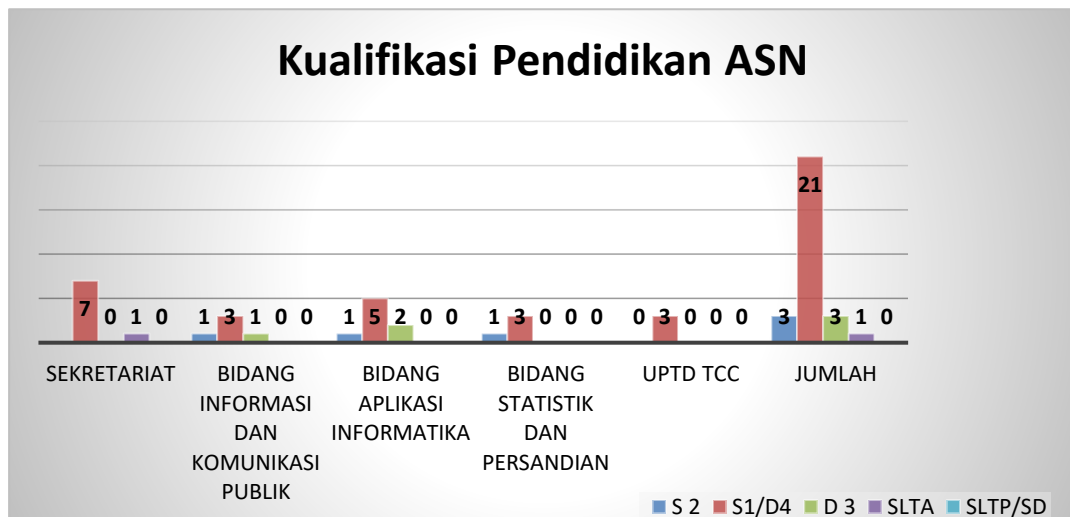
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Tabel 2.2 Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak

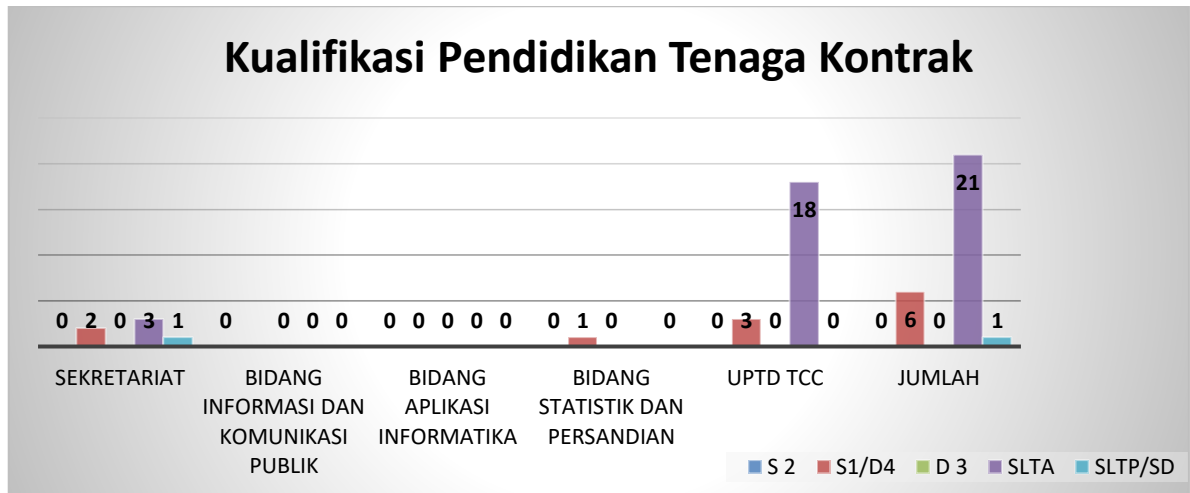
Sekretariat / Bidang	S 2		S1/D4		D 3		SLTA		SLTP/SD		Jumlah
	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	
a. Sekretariat	-	-	7	2	-	-	1	3	-	1	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5
e. UPTD TCC	-	-	3	3	-	-	-	18	-	-	24
Jumlah	3	-	21	6	3	-	1	21	-	1	56

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar 2.3 Grafik kualifikasi Pendidikan ASN



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar 2.4 Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Tabel 2.3 Daftar Inventaris Barang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kota Tarakan Tahun 2024

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
A. Gedung dan Bangunan						
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bertingkat, beton	2012	Buah	B	1
2.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	-
3.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	3
B. Jalan, Irigasi dan Jaringan						
1.	Instalasi PLTG Kapasitas Kecil		2012		B	
2.	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang		2012		B	
3.	Instalasi Jaringan Televisi		2022		B	
C. Peralatan dan Mesin						
I. Alat transportasi						
1.	Mobil	Toyota	2010-2015	Unit	B	5
2.	Motor	Yamaha, Honda	2011-2013	Unit	B	13

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
3.	Mobil Ambulance		1990-2019	Unit	B	7
4.	Mobil Jenazah		2007-2013	Unit	B	3
5.	Mobil Ambulance	Wuling/Formo 1.2 BV (4x2) M/T	2021	Unit	B	1
6.	Mobil Jenazah	Suzuki/Ambulance	2022	Unit	B	1
II. Alat ukur						
1.	GPS Portable	Garmin Oregon 550	2014	Buah	B	1
III. Alat Kantor Dan Rumah Tangga						
A. Alat kantor						
1.	Rak Server	Rack	2012	Buah	B	3
2.	Filing Kabinet 4 Laci	Takashimura	2004	Buah	B	2
3.	Lemari Besi /Metal	-	2012	Buah	B	2
4.	Papan Pengumuman	-	2012	Buah	B	1
5.	Rak Kayu	-	2013	Buah	B	2
6.	Loker TCC	-	2020	Buah	B	4
7.	Alat Pemadam Kebakaran	Autofex	2023	Tabung	B	4
B. Alat kantor lainnya						
1.	LCD Proyektor	Benq	2012	Unit	B	1
2.	LCD Proyektor	Epson	2014	Unit	B	1
C. Alat rumah tangga lainnya						
1.	Wireless	-	2012	Buah	B	1
2.	Kamera DSLR	CANON	2013	Unit	B	1
3.	Handycam	Sony HDR-PJ34OE	2015	Unit	B	4
4.	Lensa Kamera DSLR	CANON Coolpix L320	2015	Unit	B	2
5.	Kamera Udara	DJI Mavic / Mini Combo	2020	Unit	B	1
6.	Pengering Tangan	Hoffmann	2012	Unit	B	5
7.	Gorden	-	2012	Buah	B	
8.	Penyemprot Tangan	-	2021	Buah	B	2
9.	Televisi	65"	2023	Unit	B	1
10.	Tangga	-	2023	Buah	B	1
11.	Standing Braket	-	2023	Buah	B	1

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
IV. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat						
1.	Meja Kerja untuk Staf (Setengah Biro)	-	2012	Buah	B	47
2.	Kursi Kerja Non Eselon/Staf	Front Line	2012	Buah	B	47
3.	Meja Kerja Eselon	Meja Satu Biro	2012	Buah	B	6
4.	Kursi Kerja Eselon	Front Line	2012	Buah	B	6
5.	Meja Kerja Eselon II		2013	Buah	B	1
6.	Kursi		2013	Buah	B	1
7.	Meja Rapat		2013	Buah	B	1
8.	Kursi Rapat		2013	Buah	B	12
9.	Kursi Lipat Rapat		2013	Buah	B	30
V. Alat pendingin						
1.	Air Conditioner 1PK		2013-2020	Unit	B	26
2.	Air Conditioner	Precession AC	2013	Unit	B	1
VI. Personal computer & peralatan personal computer						
1.	PC	Dell, Lenovo, Asus	2012-2023	Buah	B	25
2.	Laptop	Fujitsu, Toshiba,Asus	2012 - 2022	Unit	B	8
3.	Server	Dell / Power Edge R740	2019	Buah	B	1
4.	Server	Lenovo / ST-250	2020	Buah	B	1
5.	Peralatan Komputer lainnya	Logitech / M170	2020	Buah	B	1
6.	peralatan mainframe lainnya	Frame Display (Command Center)	2020	Buah	B	1
7.	peralatan mainframe lainnya	Splicer Fiber Optic	2020	Buah	B	1
8.	peralatan mainframe lainnya	Hikvision / Exir H.265	2020	Buah	B	1
9.	peralatan mainframe lainnya	TP Link	2020	Buah	B	1
10.	Server HDD 300 GB,SAS,HotSwap 2,5”		2015		B	1
11.	Server Memory 8GB ECC DDR3	PC3012800 CL11	2015		B	6

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
12.	Line Interactive, UPS 2200VA / 1920W, PF 0.87, Single Pasa 230V, 2U Rackmount, RS-232 serial port, USB, UPS Management Software		2015		B	1
13.	Router Board Wireless Router		2015		B	1
14.	Komputer	ASUS Business	2016		B	1
15.	Printer	Epson	2011	Unit	B	5
	Scanner	DR-C240	2020	Unit	B	4
16.	Webcam Video Conference	Tenveo, Webam Pro Stream	2023	Unit	B	3
17.						
18.	Laptop	Acer/Core-i5,14", apple	2023,2024	Unit	B	5
19.	Server	HikVision	2022	Unit	B	1
20.	CCTV	-	2023	Unit	B	2
21.	P.C Unit	Lenovo PC	2023	Unit	B	1
22.	Printer	Epson/ L121	2023	Unit	B	1
23.	Head Sat	Logitech/H150	2023	Unit	B	6
VII. Peralatan computer mainframe						
1.	Mikrotik Mikrobites Dinara		2016	Unit	B	1
2.	Mikrotik Console Cable Dinara		2016	Unit	B	1
3.	RouterBoard Cloud Router Switttch		2016	Unit	B	1
4.	Lenovo 69Y5326		2016	Unit	B	1
5.	IBM Server Memory (90Y3109)		2016	Unit	B	18
6.	Lenovo Storage S2200 (6TB SAS)		2016	Unit	B	1
7.	APC SMT2200RMI2U		2016	Unit	B	2
8.	Apple iMAC With Retina Display AIO		2016	Unit	B	2
9.	APC SMC15000I		2016	Unit	B	3
10.	RouterBoard Cloud Core Router		2016	Unit	B	1
11.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
12.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
13.	Lenovo Server Power Supply (94Y6668)		2016	Unit	B	1
14.	Fluke True RMS Multimeter		2016	Unit	B	1
15.	Fluke Clam Meter (317)		2016	Unit	B	1
16.	Memory SDXC		2016	Unit	B	1

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
17.	UPS	500va	2023	Unit	B	1
VIII. Peralatan jaringan						
1.	Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)	-	2011	Paket		1
2.	Tool Box Set	-	2007	Buah	B	1
3.	Crimping tool	-	2007	Buah	B	1
IX. Alat studio dan alat komunikasi						
A. Peralatan studio visual						
1.	Stabilizer 3000VA	DJI Osmo/Mobile 4 Combo	2015,2020	Buah	B	1
2.	Handy Talky(HT)	Inrico/T298s	2020	Buah	B	6
3.	Power Mixer	Soundbest J5-4D	2020	Buah	B	1
B. Peralatan studio video & film						
1.	Lensa Kamera	Canon 18-20mm	2014		B	1
2.	Lensa Kamera		2015		B	1
3.	Lensa camera	Nikon Tele	2016	Unit	B	1
4.	Dry Kabinet Ukuran Besar		2016	Unit	B	1
5.	Amplifier	TOA	2020	Unit	B	1
6.	Microphone	TOA,Rode PSI,Boya/BY-VM600	2020	Unit	B	5
7.	Kamera Digital	EOS/900D,Miroles/XAS	2020	Unit	B	4
8.	Tripod Kamera	Excell Travel Pro	2020	Buah	B	3
D. ASET LAINNYA						
1.	Sistem Elektronik (Website) Resmi	Software	2017	Paket	B	2
2.	Aplikasi Pengaduan Masyarakat/PPID	Software	2017	Paket	B	1
3.	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masyarakat	Software	2017	Paket	B	1
4.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Disdukcapil)	Software	2019	Paket	B	1
5.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Kecamatan)	Software	2019	Paket	B	1
6.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Dinas Pendidikan)	Software	2020	Paket	B	1

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
7.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Perpustakaan dan Kearsipan)	Software	2020	Paket	B	1
8.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (DPMPTSP)	Software	2020	Paket	B	1
9.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (BKPSDM)	Software	2020	Paket	B	1

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek efesiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip tata pemerintahan yang baik atau Good Government merupakan isu pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Ketatnya persaingan global menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan good governance. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi

kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good government melalui electronic government (e-government), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melaksanakan tugas di bidang Statistik dan Persandian. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra DKISP Tahun 2020-2024 dapat dianalisis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DKISP Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kontribusi provider telekomunikasi				100%	10 %	100%	100%	0	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%	0	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%	0
3.	Persentase media layanan informasi publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral				65%	70%	80%	90 %	100%	81,3%	90%	93,3%	96,7%	100%	125%	128,6%	116,6%	107,4%	100%
5.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	133,33%	100%	100%	100%	100%	133,33%
6.	Nilai dan predikat SAKIP				60/B	60/B	70/B	70/B	79,55/BB	63,80/B	50,48/CC	65,41/B	71,03/BB	79,55/BB	106,33%	84,13%	93,44%	101,47%	100%

Catatan : Tahun 2024 Retribusi Menara telekomunikasi sudah tidak lagi dilaksanakan pemungutan karena adanya perubahan peraturan sehingga indikator persentase kontribusi provider telekomunikasi tidak ada target dan realisasinya

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)		(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung/ Belanja Pegawai	3.661.032.105	4.136.164.687	3.958.076.000	3.961.926.000	4.118.535.561	3.573.055.666	3.619.214.686	3.815.417.041	3.831.338.157	3.947.521.336	97,60	87,50	96,40	96,70	95,85	2,99	2,52
Belanja Langsung	3.349.068.970	2.300.450.400	2.542.808.800	3.019.461.107	3.642.379.808	2.785.803.464	1.884.838.287	2.295.751.112	2.874.266.658	3.421.250.614	83,18	81,93	90,28	95,19	93,93	2,12	5,27
Toatal Anggaran	7.010.101.075	6.436.615.087	6.500.884.800	6.981.387.107	7.760.915.369	6.358.859.130	5.504.052.973	6.111.168.153	6.705.604.815	7.368.771.950	90,72	85,51	94,01	96,05	94,95	2,58	3,75

Dari Tabel 2.4 dan 2.5 berisi capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2020 – 2025, indikator kinerja pelayanan secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

• **Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan.**

Seluruh Perangkat Daerah sudah terhubung dengan akses internet server atau bandwidth server yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, namun permasalahannya sampai saat ini yang mampu disediakan hanya sebatas bandwidth server sementara bandwidth internet teralokasi anggrannya di masing-masing Perangkat Daerah.

Sebagai tambahan informasi sampai dengan tahun 2024 telah terpasang jaringan Fiber Optik yang dikelola oleh Perumda Telekomunikasi dimana dari 30 Perangkat daerah telah tersambung sebanyak 21 perangkat daerah sehingga masih ada 9 Perangkat Daerah yang belum saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah karena belum tersambung jaringan Fiber Optik. Pemasangan Fiber Optik ke seluruh Kota Tarakan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Tarakan. Jaringan Fiber Optik sangat diperlukan guna mendapatkan manfaat seperti penggunaan bandwith yang lebih besar, kecepatan internet yang lebih tinggi, jarak lebih jauh, gangguan yang lebih sedikit serta biaya total kepemilikan yang lebih rendah. Pemasangan Jaringan Fiber Optik mendukung Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan guna menunjang nilai domain tata keola SPBE.

Berikut Perangkat Daerah yang sudah terpasang jaringan fiber optik:

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Sekretariat Dewan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Perikanan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
20. Kecamatan Tarakan Barat
21. Kecamatan Tarakan Tengah

Perangkat Daerah yang belum terpasang jaringan fiber optic sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Inspektorat
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8. Kecamatan Tarakan Timur
9. Kecamatan Tarakan Utara

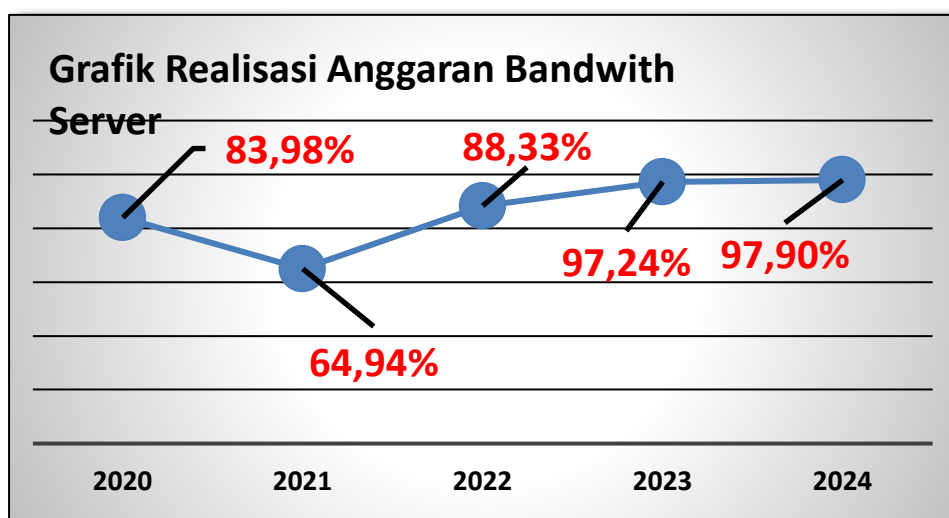
Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi OPD yang Terkoneksi *Bandwith Server* untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.6
Target dan Realisasi OPD yang terkoneksi Bandwidth Server Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target Jumlah OPD	Realisasi	Persentase	Kategori/Keterangan
1.	2020	32 OPD	32 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk layanan publik Call Center 112, Fleet Management System dan aplikasi pengaduan e-Qlue
2.	2021	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
3.	2022	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
4.	2023	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 18 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
5.	2024	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 18 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 - 2024

Gambar 2.5
Grafik Realisasi Anggaran Bandwidth Server Tahun 2020-2024



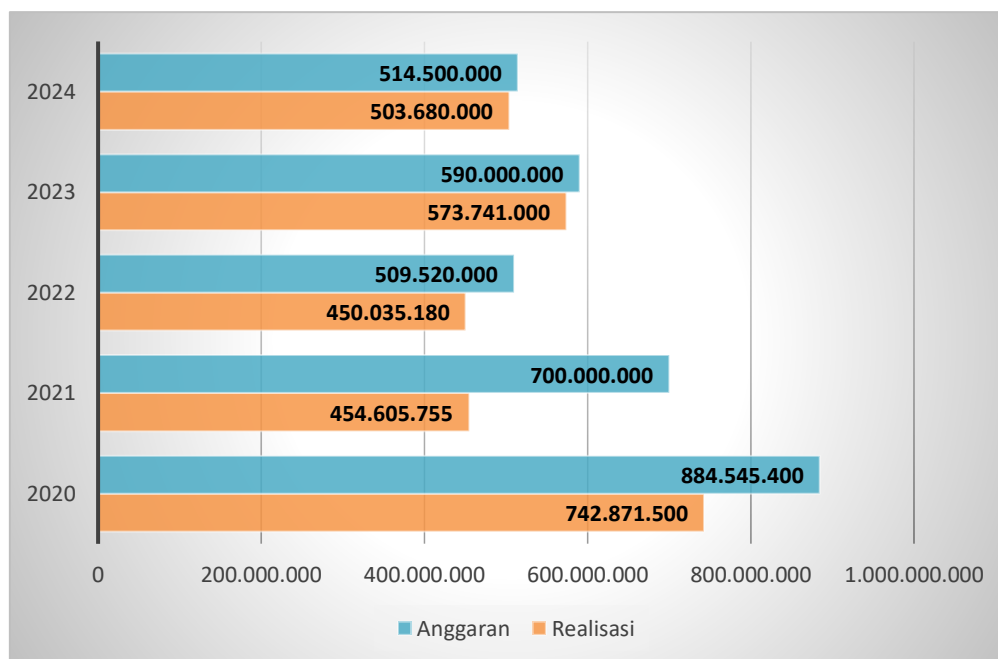
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bandwith untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Anggaran Bandwidth
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	884.545.400	742.871.500	83,98
2.	2021	700.000.000	454.605.755	64,94
3.	2022	509.520.000	450.035.180	88,33
4.	2023	590.000.000	573.741.000	97,24
5.	2024	514.500.000	503.680.000	97,90

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.6
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bandwidth
Tahun 2020-2024



• **Persentase media layanan informasi publik**

Capaian kinerja persentase media layanan informasi publik selalu mencapai target karena semua informasi publik pemerintah Kota Tarakan diseminasikan melalui 5 jenis media layanan informasi publik yaitu media massa (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (televisi, Radio), media luar ruang (spanduk, baliho dan videotron), Media online (website, youtube, instagram, facebook), media interpersonal (studio podcast dan zoom meeting). Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Media Layanan Informasi Publik 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Media Layanan Informasi Publik
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2020	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
2.	2021	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
3.	2022	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
4.	2023	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
5.	2024	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

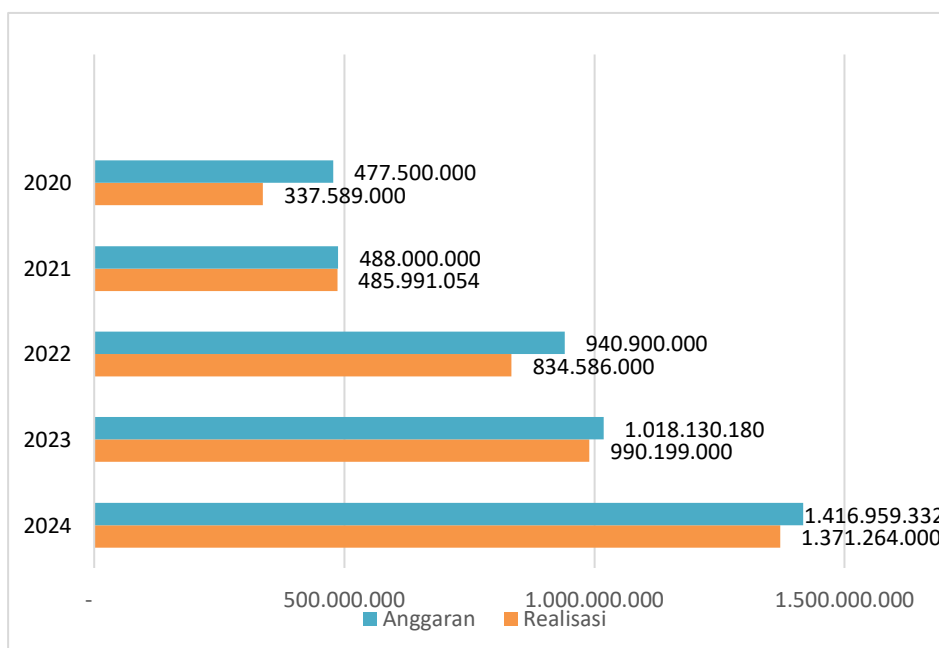
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan Informasi Publik untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan Informasi Publik
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	477.500.000	337.589.000	70,70
2.	2021	488.000.000	485.991.054	99,59
3.	2022	940.900.000	834.586.000	88,70
4.	2023	1.018.130.180	990.199.000	97,11
5.	2024	1.416.959.332	1.371.264.000	96,78

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.7
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran
Media Layanan Informasi Publik
Tahun 2020-2024



- **Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral**

Capaian kinerja Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral selalu mencapai target, hanya saja data sektoral yang dikumpulkan Perangkat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata masih harus melalui verifikasi dan validasi lebih lanjut dalam rangka menjamin kebenaran data yang disajikan serta dalam pemenuhan standar data dan metadata statistik.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai walidata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Tarakan sebagai Pembina data dan Bappeda Litbang sebagai sekretariat Forum Satu Data melakukan pembinaan penguatan statistik sektoral melalui penyusunan metadata statistik pada perangkat daerah di akhir tahun 2024. Namun dari data-data statistik sektoral yang sudah dikumpulkan ke Walidata masih banyak yang belum memenuhi standar data dan metadata statistik, dan ada beberapa indikator kinerja kunci sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada perangkat daerah yang tidak ada datanya dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data statistik sektoral.

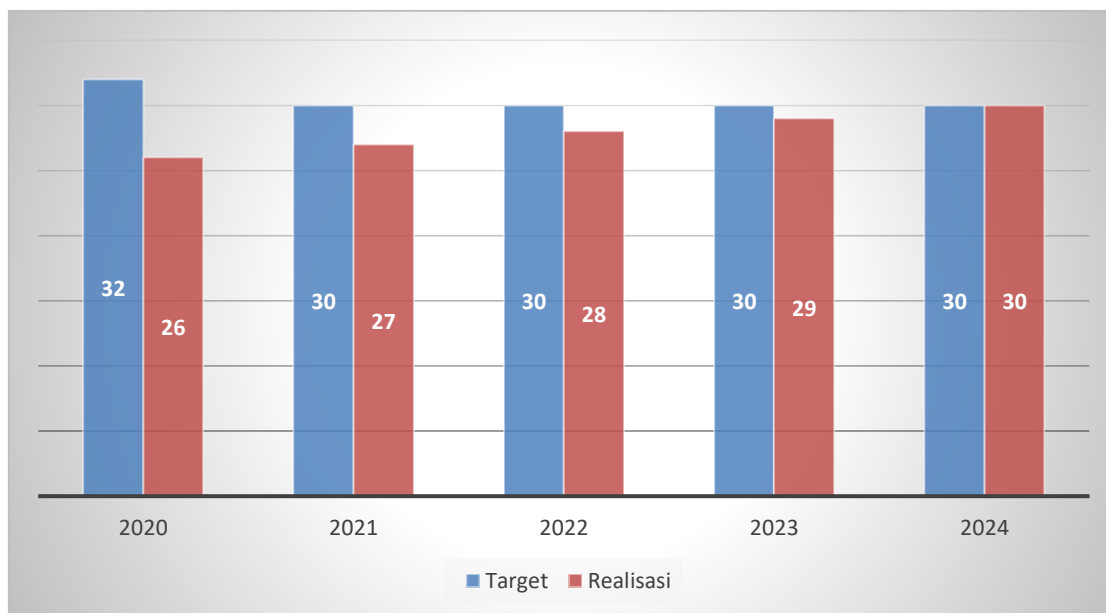
Target dan Realisasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi OPD yang berkontribusi terhadap
penyediaan data sektoral
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target OPD	Realisasi	Persentase (%)
1.	2020	32 OPD	26 OPD	81,25 %
2.	2021	30 OPD	27 OPD	90,00 %
3.	2022	30 OPD	28 OPD	93,33 %
4.	2023	30 OPD	29 OPD	96,67 %
5.	2024	30 OPD	30 OPD	100,00 %

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.8
Grafik Target dan Realisasi OPD yang berkontribusi terhadap
penyediaan data sektoral
Tahun 2020-2024



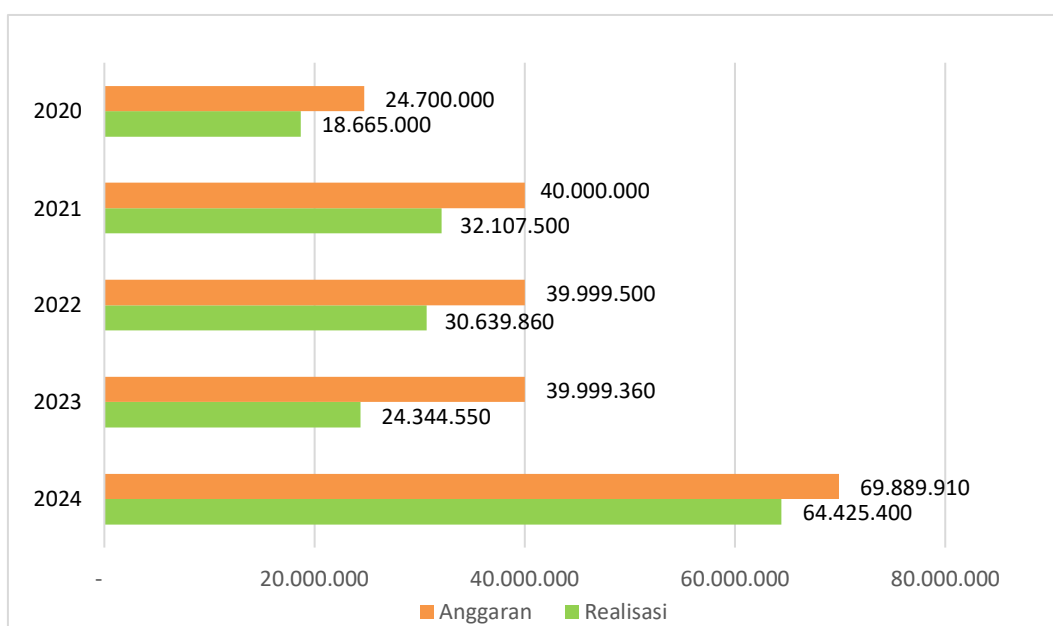
Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	24.700.000	18.665.000	75,57
2.	2021	40.000.000	32.107.500	80,27
3.	2022	39.999.500	30.639.860	76,60
4.	2023	39.999.360	24.344.550	60,86
5.	2024	69.889.910	64.425.400	92,18

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.9
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Tahun 2020-2024



- **Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi**

Capaian kinerja Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi selalu mencapai target, setiap tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menganggarkan kegiatan untuk melakukan inovasi Atau pembaharuan dalam pembuatan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi, hanya saja hasilnya masih belum optimal, karena Sumber Daya manusia di bidang IT masih sangat kurang.

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2020	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi e – presensi 3. Aplikasi e – parkir 4. Aplikasi e – perpustakaan 5. Aplikasi Perijinan DPMPTSP
2.	2021	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Pemeliharaan aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi BPBD 3. Aplikasi Website BPKPAD 4. Aplikasi Call Center 112
3.	2022	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi E-Kinerja 2. Aplikasi Pajak Online 3. Aplikasi Video Analytic 4. Aplikasi Call Center 112
4.	2023	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi Dashboard TCC 2. Pengembangan Aplikasi tarakankota.go.id 3. Pengembangan Aplikasi PD 4. Pemeliharaan Aplikasi Penanaman Modal 5. Aplikasi Video Analytic 6. Aplikasi Call Center 112

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
5.	2024	6 Aplikasi	8 Aplikasi	133,33 %	1. Aplikasi Layanan Call Center 112 2. Aplikasi Video Analytic 3. Website Website JDIH (Pengembangan) 4. Website DKUKMP (Pengembangan) 5. PPDB Online (Pemeliharaan) 6. Aplikasi CCTV (Pengembangan) 7. Aplikasi Presensi BKPSDM (Pengembangan) 8. Aplikasi SIMPEG (Pengembangan)

Sumber Data : Laporan Bidang Aplikasi dan Informatika dan Laporan Konsolidasi Pembangunan 2024

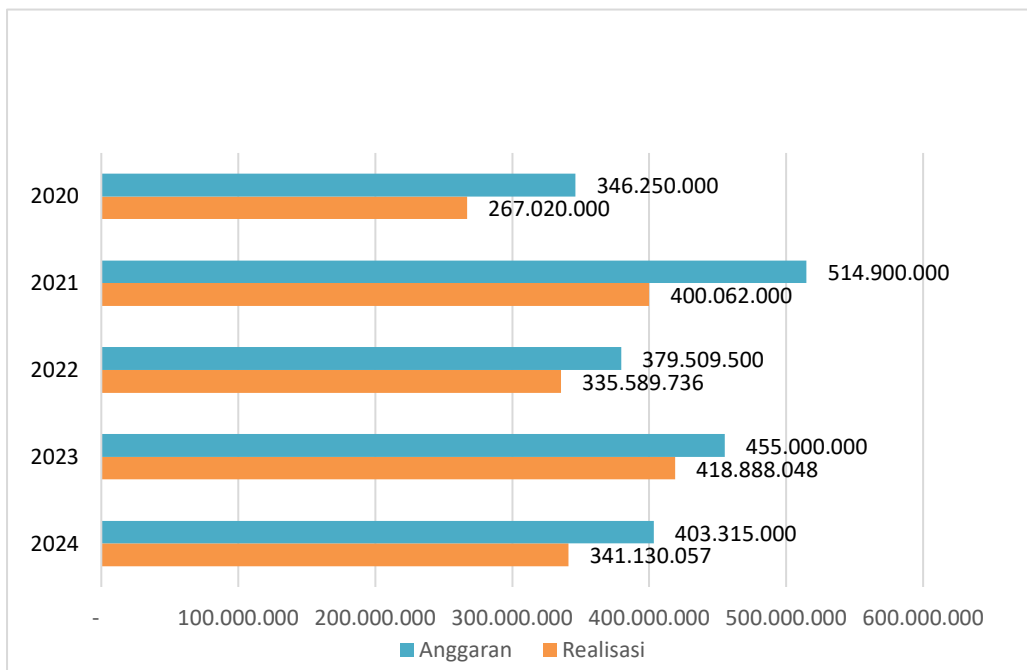
Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Aplikasi Layanan Publik untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Anggaran Aplikasi Layanan Publik
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	346.250.000	267.020.000	77,12
2.	2021	514.900.000	400.062.000	77,70
3.	2022	379.509.500	335.589.736	88,43
4.	2023	455.000.000	418.888.048	92,06
5.	2024	403.315.000	341.130.057	84,58

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan
 Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.10
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran
Aplikasi Layanan Publik
Tahun 2020-2024



- **Nilai dan predikat SAKIP**

Nilai/Predikat Sakip adalah nilai atau predikat dari Laporan Hasil Evaluasi Sakip yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi nilai Sakip DKISP Tahun 2024 adalah 79,55 atau dengan predikat BB dari target yang ditetapkan sebesar 79,55/BB atau tingkat capaian sebesar 100,00 %, penyebab tercapainya target LHE Sakip antara lain :

1. Penetapan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan.
2. Dokumen perencanaan dan keuangan telah dipublikasikan pada Website resmi PD atau Website Pemerintah Kota Tarakan yang dapat memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses .
3. Evaluasi internal telah dilaksanakan dan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.

4. Dokumen LKIP didukung basis data yang kompeten yang dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya dan *up to date* .

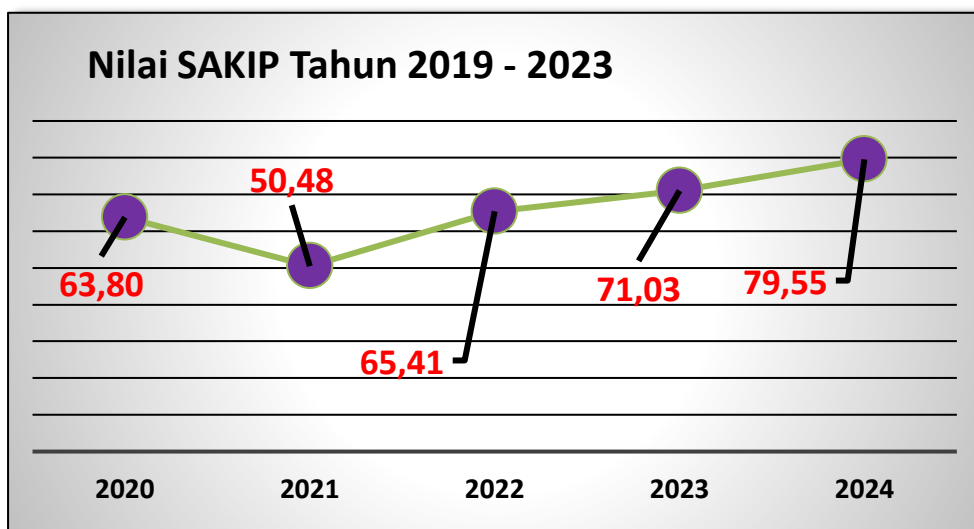
Target dan Realisasi Nilai Sakip dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Nilai LHE SAKIP
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target Nilai/Predikat	Realisasi Nilai/Predikat	Keterangan
1.	2020	65/B	63.80/B	Baik
2.	2021	65/B	50.48/CC	Cukup
3.	2022	70/B	65.41/B	Baik
4.	2023	70/B	71,03/BB	Sangat Baik
5.	2024	79,55	79,55/BB	Sangat Baik

Sumber data : LHE Sakip Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.11
Grafik Realisasi Nilai LHE SAKIP
Tahun 2020-2024



• **Kesimpulan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja**

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menunjukkan hasil yang sangat positif dengan sebagian besar target tercapai bahkan terlampaui.

Pencapaian yang sangat baik dan signifikan pada sebagian besar indikator-indikator utama menunjukkan adanya kapasitas dan komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas pelayanan yang komprehensif .

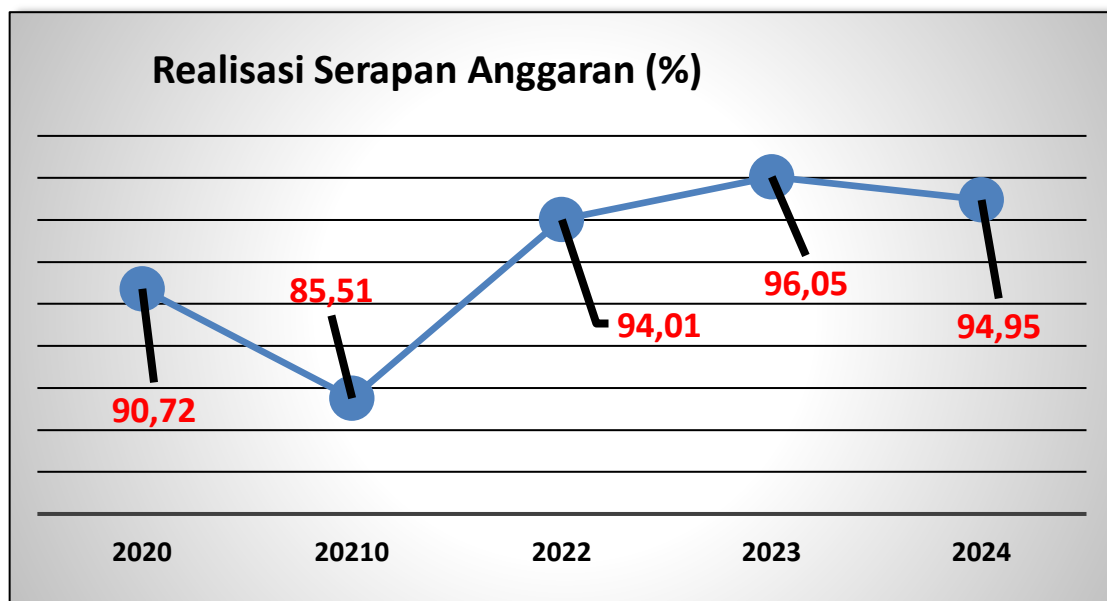
Selain keberhasilan dalam pencapaian target kinerja juga diikuti dengan pencapaian target dari realisasi keuangan atau serapan anggaran kegiatan yang cukup baik dengan rata-rata serapan diatas 85 % hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.15
Perbandingan Antara Anggaran dan Realisasi Serapan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase realisasi(%)
1	2020	7.010.101.075	6.359.277.130	650.823.945	90,72
2	2021	6.436.615.087	5.504.052.973	932.562.114	85,51
3	2022	6.500.884.800	6.111.168.153	389.716.647	94.01
4	2023	6.981.387.107	6.705.604.815	275.782.292	96,05
5	2024	7.760.915.369	7.368.771.950	392.143.419	94,95

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.12
Grafik Persentase Realisasi Serapan Anggaran
Tahun 2020-2024



Meskipun secara umum tingkat pencapaian target kinerja dan target realisasi keuangan telah cukup baik akan tetapi tetap diperlukan perhatian khusus pada indikator yang mengalami fluktuasi atau indikator yang memiliki tingkat resiko kegagalan yang tinggi .

Pembelajaran dari fluktuasi kinerja, kesenjangan yang teridentifikasi, meskipun relatif kecil dapat menjadi bahan evaluasi, mitigasi risiko yang lebih efektif dan pengembangan strategi yang lebih baik untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang, terutama dalam aspek konsistensi pelaksanaan program, memastikan konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah kelompok yang menjadi sasaran dan penerima kemanfaatan program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan kapasitas dan kualitas dalam layanan informasi, dokumentasi, data statistik dan keamanan informasi . Kelompok sasaran layanan secara umum dikelompokkan menjadi :

1) ASN dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan mencakup ASN dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berjumlah sebanyak 30 Perangkat Daerah. Adapun layanan yang disediakan antara lain sebagai berikut:

- a) Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b) Layanan diseminasi informasi kegiatan dan layanan di Lingkungan Pemerintah Kota tarakan;
- c) Melaksanakan pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Tarakan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Tarakan dengan menyelesaikan permohonan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d) Layanan monitoring informasi, opini dan aspirasi publik dengan mengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR) Pemerintah Kota Tarakan;
- e) Mengelola Media Komunikasi Publik Pemerintah Kota Tarakan diantaranya: Stand Baliho, Videotron dan Media Online Pemerintah Kota Tarakan (Website, Instagram dan Facebook);

- f) Mengelola nama domain dan subdomain di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- g) Fasilitasi kegiatan videoconference dan zoom meeting dengan penyediaan sarana, prasarana serta ruangan kegiatan;
- h) Melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- i) Menyediakan dan mengelola NOC (Network Operation Center) dan data center Pemerintah Kota Tarakan;
- j) Mengelola portal layanan Pemerintah Kota Tarakan yang terintegrasi diantaranya portal layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;
- k) Sebagai Walidata Pemerintah Kota Tarakan;
- l) Layanan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) .

2) Sekolah/Universitas/Perguruan Tinggi

Memberikan kesempatan kepada Sekolah/Universitas/Perguruan Tinggi yang ingin melaksanakan pemagangan atau praktek kerja lapangan (PKL) pada siswa/mahasiswanya di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan jurusan pendidikan yang ditempuh .

3) Perumda

Layanan dan kerjasama dengan Perumda Tarakan Media Telekomunikasi antara lain :

- a) pengawasan penyediaan jaringan fiber optic untuk pendistribusian bandwidth kepada sebagian besar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tarakan
- b) pemanfaatan jaringan fiber optic untuk pemantauan keamanan dan lalu lintas jalan/kendaraan melalui CCTV
- c) pembuatan video kegiatan pembangunan dan layanan publik untuk desiminasi informasi dan komunikasi pada masyarakat

4) Masyarakat

Sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada kelompok Masyarakat antara lain:

- a) Layanan diseminasi informasi publik berupa kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Tarakan melalui media komunikasi publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diantaranya: Stand Baliho, Videotron dan Media Online Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Website, Instagram, WhatsApp dan Facebook);
- b) Layanan diseminasi informasi publik berupa kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Tarakan melalui media komunikasi publik diantaranya: stand baliho, media cetak dan Media Online (Website, Instagram dan Facebook);
- c) Layanan opini dan aspirasi publik melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR) Pemerintah Kota Tarakan;
- d) Layanan kegawat daruratan melalui layanan call center 112 yang merupakan layanan call center 24 jam yang menghubungkan panggilan kegawat daruratan untuk pemadam kebakaran, ambulan angkut, mobil jenazah yang terintegrasi dan gratis untuk Masyarakat;
- e) Layanan video analytic atau pemantauan keamanan dan lalulintas jalan/kendaraan melalui CCTV di titik Lokasi strategis di wilayah kota tarakan

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Pendampingan untuk transformasi layanan publik digital, pengembangan infrastruktur dan sumberdaya TIK serta peningkatan kapasitas SDM digital

2) Badan Pusat Statistik (BPS)

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memberikan layanan data statistik sektoral diantaranya sebagai berikut :

- Pembinaan penyelenggaraan (perencanaan, pengumpulan, verifikasi dan penyebarluasan data) kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kota Tarakan;
- Penerbitan surat rekomendasi kegiatan statistik baik survei dan kompilasi produk administrasi;
- Bergabung dengan tim penilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- Membantu menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan di bidang Statistik .

3) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memberikan layanan keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, diantaranya sebagai berikut:

- CSIRT: Layanan keamanan siber, tanggap insiden siber dan membangun kapasitas sumber daya keamanan siber;
- Penyelenggaraan sertifikat elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terpercaya di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Layanan ini untuk penandatanganan dokumen elektronik yang merepresentasikan individu yang dilakukan secara aman dan legal;

- Konsultasi dan pendampingan langsung terkait konfigurasi keamanan, audit sistem, dan penerapan standar keamanan siber di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- Narasumber Sosialisasi kegiatan di bidang persandian;

4) Pemerintah Provinsi Kaltara

- Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta target capaian antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Pelatihan dan sosialisasi dari Provinsi Kaltara untuk peningkatan kapasitas SDM dan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- Sebagai Narasumber untuk kegiatan-kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

5) Sektor Swasta

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan bermitra dengan pihak Swasta dalam memberikan pelayanan antara lain:

- a. Bermitra dengan perusahaan-perusahaan teknologi dalam rangka penyediaan layanan pembangunan dan pengembangan aplikasi, layanan call center 112, bandwidth internet CCTV; dan
- b. Bermitra dengan pers yang terdiri dari media-media online, media cetak dan media elektronik (televisi dan radio) baik media lokal maupun media nasional.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang (Tahun 2020 - 2024) serta tantangan dan peluang. Berikut Adalah pemetaan permasalahan utama pelayanan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang dapat dijabarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.16
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan

MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1. Kurang optimalnya transformasi aplikasi layanan publik (pembuatan, pengembangan, pemeliharaan dan integrasi aplikasi) 2. Rendahnya tingkat keamanan dan perlindungan data center (NOC) 3. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE 4. Kurangnya kompetensi penyelenggara TIK seperti pemasaran digital, pemrograman dan pengembangan aplikasi, keamanan ciber, kecerdasan buatan 5. Cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV yang belum optimal 6. Masih rendahnya waktu tanggap layanan kegawatdaruratan ambulance dan mobil jenazah

MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	2. Belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik	1. Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan pelayanan publik (Sp4an Lapor) 2. Kurangnya sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pembantu 3. Kurangnya pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumentasi
	3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektor	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government 2. Masih rendahnya data statistik sektoral perangkat daerah yang disusun berdasarkan metadata dan standar data 3. Belum terwujudnya Portal Satu Data Kota Tarakan sehingga Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah belum terintegrasi

MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	4. Belum optimalnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	1. Belum optimalnya implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kota 2. Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security 3. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi

b. Isu Strategis

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan serta memperhatikan analisis permasalahan yang sedang terjadi selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam Perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Dengan memperhatikan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis tersebut berikut isu-isu strategis :

Tabel 2.17
Isu Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Adanya regulasi yang mendukung seperti SOTK, perwali SPBE, SOP layanan digital, perwali penyelenggaraan SDI, Penggunaan TTE terkait e-Catalog versi 6 2. Mendapatkan dukungan anggaran 3. Ketersediaan aplikasi dari pusat yang digunakan seluruh daerah	Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1. Keterbukaan Informasi 2. Integrasi Data ke dalam Sistem Informasi Pemerintah 3. Peningkatan Akses Teknologi Informasi untuk Mendukung Partisipasi Publik 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis	1. Transformasi Digital Global 2. Keamanan Siber Internasional 3. Tuntutan Interoperabilitas Layanan Digital 4. Percepatan Adopsi Teknologi AI dan Big Data	1. Penerapan SPBE dan Reformasi Birokrasi Digital 2. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) 3. Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu 4. Peningkatan Literasi dan Infrastruktur Digital	1. Kesiapan Infrastruktur dan SDM Daerah 2. Kebutuhan Layanan Publik yang Cepat dan Transparan 3. Integrasi Data dan Layanan Antar Perangkat Daerah 4. Komitmen Kepala Daerah dalam	tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4. Memiliki Media sosial, website resmi, PPID, layanan aduan digital (Sp4N LapoR) 5. Pengelolaan dan diseminasi data melalui satu data daerah 6. Kerja sama dengan penyedia layanan cloud, universitas, BUMD/BUMN TIK.		Elektronik untuk Keberlanjutan 5. Ketahanan Informasi dan Keamanan Data			Transformasi Digital	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan telah menetapkan Visi dan Misi yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mewujudkan **Misi 4** yaitu *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota*, **Tujuan 4** yaitu *Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan* dan **sasaran 12** yaitu *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merumuskan Tujuan yaitu : **“Meningkatnya Tata Kelola Dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik”**.

Electronic Government disingkat e-Gov merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Inti dari penerapan *e-Government* adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi bagi mewujudkan Good Governance.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan telah menetapkan sasaran dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah;
5. Meningkatnya tata kelola DKISP

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pembangunan Kota Tarakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik		Indeks SPBE (poin)	3,21	3,21	3,31	3,41	3,51	3,61	3,71
		1. Meningkatkan penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks domain tata Kelola SPBE (poin)	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	23
		2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi public (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (poin)	2,25	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5	2,6
		4. Meningkatkan Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Meningkatkan Tata Kelola DKISP	Nilai dan predikat SAKIP (nilai)	71,55/BB	79,55/BB	79,60/BB	79,65/BB	79,70/BB	79,75/BB	79,80/BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	88,00/BB	88,64/A	88,70/A	88,72/A	88,75/A	88,83/A	88,85/A

2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

a. Strategi

Sasaran organisasi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, karenanya harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Apabila telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Untuk itu diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan PD, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis

Berikut rumusan pernyataan strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rumusan Strategi

Tujuan		Sasaran		Strategi
Meningkatnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1.	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1.	Peningkatan pengelolaan digitalisasi layanan publik
			2.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			3.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK
	2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			2.	Meningkatkan kerjasama antar PPID utama dan pembantu
	3.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			2.	Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Melalui Kemitraan
			3.	Membangun portal satu data indonesia
	4.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	1.	Penyusunan dan Penegakan Kebijakan Keamanan
			2.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			3.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK

Tujuan		Sasaran		Strategi
			4.	Sosialisasi dan evaluasi implementasi TTE seluruh OPD
			5.	Kolaborasi dengan Penyedia Jasa Keamanan dan Sertifikasi
	5.	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	1.	Mengoptimalkan sumber daya di perangkat daerah

b. Penahapan Renstra

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kota Tarakan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Untuk menjamin ketercapaian tujuan secara efektif dan berkesinambungan, pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra DKISP dilaksanakan melalui pendekatan penahapan pembangunan.

Penahapan ini disusun secara sistematis dan terukur, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kebutuhan prioritas daerah, serta dinamika perkembangan teknologi dan regulasi di bidang komunikasi dan informatika. Penahapan juga menjadi instrumen penting untuk mengatur skala prioritas tahunan, memudahkan koordinasi antarbidang, serta menjadi dasar monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik.

Penahapan pembangunan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan dan Penguatan Pondasi SPBE : – Pemetaan sistem/aplikasi eksisting di PD – Penataan kelembagaan SPBE (tim koordinasi, regulasi) – Penilaian awal indeks SPBE dan kebutuhan infrastruktur – Penyusunan masterplan TIK dan arsitektur SPBE daerah	Mengembangkan Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Dasar : – Digitalisasi layanan prioritas (perizinan, kependudukan, aduan) – Penyesuaian SOP layanan digital – Peningkatan kapasitas SDM TIK – Implementasi tanda tangan elektronik dan sistem keamanan siber dasar	Integrasi Sistem dan Layanan Antar Perangkat Daerah : – Pembangunan dashboard layanan publik terpadu – Interkoneksi antar-aplikasi dinas – Penguatan data warehouse & satu data daerah – Uji coba layanan digital lintas sektor	Transformasi Digital dan Pemanfaatan Data : – Pengembangan layanan berbasis AI/data analytics – Evaluasi indeks SPBE tengah periode – Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui kanal digital – Optimalisasi Mal Pelayanan Publik Digital	Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Pemerintah Digital : – Penilaian akhir SPBE dan dampaknya terhadap pelayanan public – Pemutakhiran arsitektur SPBE – Penyesuaian regulasi dan kelembagaan – Penyusunan roadmap lanjutan dan replikasi praktik baik

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis. Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dijelaskan dalam dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	1. Peningkatan transformasi aplikasi layanan publik (pembuatan, pengembangan, pemeliharaan dan integrasi aplikasi) 2. Peningkatan keamanan dan perlindungan data center (NOC) 3. Peningkatan penyelenggaraan SPBE 4. Peningkatan kompetensi penyelenggara TIK seperti pemasaran digital, pemrograman dan pengembangan aplikasi, keamanan ciber, kecerdasan buatan 5. Optimalisasi cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV 6. Peningkatan waktu tanggap layanan kegawatdaruratan ambulance dan mobil jenazah 7. Penambahan SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan pelayanan publik (span lapor) 8. Peningkatan sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pembantu 9. Peningkatan pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumentasi

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
		10. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government 11. Peningkatan data statistik sektoral perangkat daerah yang disusun berdasarkan metadata dan standar data 12. Tersedianya Portal Satu Data Kota Tarakan sehingga Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah terintegrasi 13. Peningkatan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kota 14. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security 15. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 2 (dua) tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

1. Uraian Program

Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program yang bersifat generik dan wajib ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Program penunjang urusan pemerintah daerah berfungsi memberikan pelayanan bagi organisasi perangkat daerah meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan yang melengkapi dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, laporan kegiatan yang meliputi Lakip, LPPD dan pelaksanaan Laporan Sakip dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melaksanakan fungsi keuangan adalah penyediaan Gaji dan TPP, pencatatan, pelaksasanaa, verifikasi administrasian keuangan PNS, membuat laporan akhir tahun, laporan akhir, LHP, laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan serta estimasi realisasi akhir tahun. Fungsi kepegawaian yaitu pelaksanaan administrasi perangkat daerah, administrasi umum, penyediaan jasa urusan, penyediaan jasa penunjang.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi serta komunikasi publik yang mendukung pelaksanaan Good Governance dan Smart Government. Program ini mencakup pengelolaan informasi dan media publik, hubungan masyarakat, serta komunikasi publik.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi informatika yang mendukung pelayanan publik dan manajemen pemerintahan. Program ini mencakup pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi e-government, serta integrasi sistem informasi. Memastikan bahwa seluruh aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berjalan optimal, aman, terintegrasi dan selaras dengan visi pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; mewujudkan integrasi data dan informasi; menjamin keamanan dan keandalan sistem; mengoptimalkan investasi teknologi informasi; mendorong inovasi dan pengembangan layanan baru; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan untuk menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Program ini mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral.

Program ini sebagai fondasi krusial bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan terukur dalam berbagai aspek pembangunan daerah dalam menyediakan data dan informasi esensial yang memungkinkan pemerintah provinsi untuk memahami kondisi riil daerah; merencanakan pembangunan yang efektif; melaksanakan program dan kegiatan yang tepat sasaran; memantau dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan; meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi; dan memperkuat koordinasi dan sinergi antar sektor.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

Program ini bertujuan untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian. Program ini mencakup tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengelolaan sumber daya persandian.

Program ini sebagai pilar fundamental untuk menjamin keamanan informasi vital yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya strategis dan berkelanjutan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi sensitif melalui pemanfaatan teknologi dan manajemen persandian yang terencana dan terukur.

2. Uraian Kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup penyusunan rencana kerja tahunan, rencana strategis, penyusunan anggaran berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah secara berkala;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meliputi pengelolaan administrasi keuangan seperti penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas daerah, verifikasi dan pencairan anggaran, serta koordinasi dengan BPKAD dalam pelaksanaan anggaran dinas;

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan operasional kantor seperti pengelolaan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, keamanan kantor, kebersihan, dan administrasi umum lainnya yang mendukung operasional dinas;

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dinas, termasuk pengadaan peralatan IT, kendaraan operasional, peralatan kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meliputi penyediaan jasa konsultansi, jasa pemeliharaan, jasa keamanan, jasa kebersihan, dan jasa penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi dinas;

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap aset daerah seperti gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan IT, dan infrastruktur lainnya untuk menjaga kondisi dan fungsinya;

g. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelolaan media komunikasi pemerintah, serta sosialisasi kebijakan dan program pemerintah daerah;

h. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan elektronik, aplikasi pelayanan publik online, integrasi sistem antar OPD, dan pengembangan smart city/smart province;

i. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral, survei dan sensus, serta penyediaan data untuk perencanaan dan pengambilan Keputusan;

j. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan pengamanan informasi dan komunikasi pemerintah melalui sistem persandian, enkripsi data, pengelolaan keamanan siber, dan pembinaan keamanan informasi;

Berikut tabel yang memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 :

Tabel 4.1
Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Pemerintah Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00	
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00	
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	25	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tunjangan ASN (Orang/bulan)												
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00	
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35		35		35		35				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4				
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00	
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23				23				23			
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		
Meningkatnya jumlah permohonan informasi yang ditanggapi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (%)	100	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00			
Tersedianya informasi pemerintah yang dipublikasikan secara luas melalui media komunikasi publik dan media massa mitra kerja	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00		
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis (Media)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1				1				1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi (%)	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Aplikasi Layanan Publik yang Dikembangkan, Dipelihara dan Siap Digunakan	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00		
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase data sektoral yang dipublikasikan (%)	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Kualitas Data statistik sektoral daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	100		100		100		100				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100		100		100		100				
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi regulasi terkait implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku (%)	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya perangkat daerah yang telah menggunakan TTE dalam proses administrasi dan layanan pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)												
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3	30		30		30		30		30		

3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Berikut tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 :

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/SubKegiatan
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik				Indeks SPBE		Mengukur tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
		Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik			Indeks Domain Tata Kelola SPBE		Mengukur tingkat kematangan tata kelola dalam penyelenggaraan SPBE oleh instansi pemerintah, mencakup aspek-aspek seperti kebijakan, perencanaan, kelembagaan, pengawasan, dan pengelolaan risiko yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SPBE.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Mengukur tingkat pencapaian realisasi pengembangan dan implementasi aplikasi layanan publik oleh instansi pemerintah daerah
				Tersedianya Aplikasi Layanan Publik yang Dikembangkan, Dipelihara dan Siap Digunakan	Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Aplikasi yang telah selesai dikembangkan, diuji, dan digunakan
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Mengukur Perhitungan Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Mengukur Perhitungan Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (TCC)
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang	Penyediaan Akses Internet	Mengukur Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		internet bandwidth server yang disediakan oleh DKISP
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik		Mengukur Persentase permohonan informasi publik yang telah diselesaikan oleh Badan Publik dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
			Meningkatnya jumlah permohonan informasi yang ditanggapi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan		Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Mengukur jenis informasi atau konten yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil disampaikan kepada publik melalui dua saluran utama yaitu Media Komunikasi Publik Pemerintah dan Media Massa Mitra Kerja Pemerintah
				Tersedianya informasi pemerintah yang dipublikasikan secara luas melalui media	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Jenis Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
				komunikasi publik dan media massa mitra kerja	komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah		media massa mitra kerja pemerintah
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Mengukur Perhitungan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	Mengukur Perhitungan Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Mengukur Perhitungan Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan media komunikasi publik	Mengukur Perhitungan Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral			Indeks Pembangunan Statistik		Mengukur tingkat penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Statistik Nasional
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Mengukur tingkat keterbukaan dan ketersediaan data sektoral yang berhasil dipublikasikan oleh instansi pemerintah (terutama perangkat daerah) kepada publik melalui media resmi
				Meningkatnya Kualitas Data statistik sektoral daerah	Jumlah Jenis data sektoral daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Jenis Data Sektoral

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Mengukur Perhitungan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang memenuhi standar dibandingkan Jumlah kegiatan statistik sektoral
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Mengukur Perhitungan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses dibandingkan Jumlah kegiatan statistik sektoral
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Mengukur Perhitungan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibandingkan dengan Jumlah kegiatan statistik sektoral
		Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital			Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE		Mengukur Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
		Pemerintah Daerah					tersertifikasi dalam proses administrasi pemerintahan
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi regulasi terkait implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Mengukur proporsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah melaksanakan penggunaan TTE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Terlaksananya perangkat daerah yang telah menggunakan TTE dalam proses administrasi dan layanan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Mengukur Perhitungan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Mengukur Perhitungan Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Walikota, Keputusan Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian		Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Walikota, Keputusan Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian
		Meningkatnya Tata Kelola DKISP			Nilai/Predikat SAKIP		Pengukuran dan penilaian secara sistematis terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program/kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu
					IKM		Mengukur kepuasan masyarakat terhadap

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
							kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DKISP
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Mengukur LHE AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mengukur Perbandingan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu dengan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mengukur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mengukur Jumlah Laporan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					Evaluasi Kinerja SKPD		Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Mengukur Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan sesuai SAP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mengukur Jumlah Dokumen Administrasi keuangan sesuai SAP
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mengukur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mengukur Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Layanan administrasi umum	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mengukur Perbandingan Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana dengan Layanan Administrasi Umum
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mengukur Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					Kantor yang Disediakan		Bangunan Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mengukur Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mengukur Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengukur Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Perbandingan Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD dan Barang Milik Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mengukur Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Persentase layanan jasa	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Perbandingan layanan jasa penunjang yang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					penunjang yang tersedia		tersedia dengan layanan jasa penunjang
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mengukur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mengukur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mengukur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Aset/BMD yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur perbandingan Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara dengan Jumlah Aset /BMD
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mengukur Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					Pajak dan Perizinannya		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mengukur Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mengukur Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00	
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Panganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Perangkat Daerah (Laporan)												
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00	
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.505.502.094,00		4.505.502.094,00		4.505.502.094,00		4.505.502.094,00		4.505.502.094,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	29	4.505.502.094,00	29	4.505.502.094,00	29	4.505.502.094,00	29	4.505.502.094,00	29	4.505.502.094,00	
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				62.226.000,00		62.226.000,00		62.226.000,00		62.226.000,00		62.226.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00	
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00	
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35		35		35		35				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4				
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00	
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23				23		23		23		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan				240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00	
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00	
Meningkatnya jumlah permohonan informasi yang ditanggapi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (%)	100	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Tersedianya informasi pemerintah yang dipublikasikan secara luas melalui media komunikasi publik dan media massa mitra kerja	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00		
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5				5				5			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1				1				1			
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1				1				1			
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi (%)	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Tersedianya Aplikasi Layanan Publik yang Dikembangkan, Dipelihara dan Siap Digunakan	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	1	350.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				450.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30	450.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase data sektoral yang dipublikasikan (%)	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Data statistik sektoral daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	100		100		100		100				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100		100		100		100				
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				8.529.000,00		8.529.000,00		8.529.000,00		8.529.000,00		8.529.000,00	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	8.529.000,00	100	8.529.000,00	100	8.529.000,00	100	8.529.000,00	100	8.529.000,00	
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				27.126.500,00		27.126.500,00		27.126.500,00		27.126.500,00		27.126.500,00	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	27.126.500,00	100	27.126.500,00	100	27.126.500,00	100	27.126.500,00	100	27.126.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				4.344.500,00		4.344.500,00		4.344.500,00		4.344.500,00		4.344.500,00	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	100	4.344.500,00	100	4.344.500,00	100	4.344.500,00	100	4.344.500,00	100	4.344.500,00	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi regulasi terkait implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku (%)	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya perangkat daerah yang telah menggunakan TTE dalam proses administrasi dan layanan pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3	30				30				30		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Persandian (Perangkat Daerah)												
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	

Tabel 4.4
Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kegiatan Rapat KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
			Subkegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Sosialisasi dan pembinaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
			Subkegiatan : Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kegiatan sp4n lapor
			Subkegiatan : Pengelolaan media komunikasi publik	publikasi, iklan, pembuatan video, cetak cover dan bongkar pasang cover baliho
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi	Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	pengembangan aplikasi dan penyusunan masterplan/arsitektur SPBE

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Subkegiatan : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	operasional UPT TCC (belanja uang makan petugas TCC, pemeliharaan jaringan CCTV, sewa jaringan CCTV)
			Subkegiatan : Penyediaan Akses Internet	Belanja sewa bandwidth NOC dan data center, sewa call center 112, lisensi ID Zoom, pemeliharaan jaringan NOC dan data center)
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	kegiatan monev walidata dan FKSD serta cetak buku statistik sektoral
			Subkegiatan : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	kegiatan SDI, monev dan honorarium tim pelaksana SDI
			Subkegiatan : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	kegiatan kegiatan proses bisnis statistik sektoral
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi regulasi terkait implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Belanja rapat pelaksanaan layanan keamanan informasi (TTE)
			Subkegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	belanja rapat penyusunan kebijakan keamanan informasi

4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target Kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul

karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMDD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan. Sedangkan penentuan target penyelenggaraan urusan dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua indikator tersebut berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
1	Indeks domain tatakelola SPBE	Poin	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3
2.	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks pembangunan statistik	Poin	2,25	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5	2,6
4.	Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TTE	%	10	100	100	100	100	100	100
5.	Nilai SAKIP PD	Nilai	71,55	79,55	79,60	79,65	79,70	79,75	79,80
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	88,64	88,70	88,72	88,75	88,83	88,85

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Outcome
Urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	94.95%	95%	95%	95%	95%	95%	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Persen	69%	69.50%	69.50%	69.50%	69.50%	69.50%	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi pedoman bagi seluruh unsur pelaksana di lingkungan DKISP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun ke depan yakni periode tahun 2025 – 2029. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Melalui penyusunan Renstra ini, DKISP menegaskan komitmennya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan perkembangan digitalisasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Program dan kegiatan yang dirancang telah melalui proses analisis yang komprehensif terhadap tantangan, peluang, serta kapasitas kelembagaan yang ada.

Penahapan pembangunan juga dirancang secara sistematis, mulai dari penguatan pondasi SPBE, pengembangan layanan digital dasar, integrasi sistem dan data, hingga transformasi digital yang lebih luas. Semua tahapan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja DKISP, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DKISP ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan atau target kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh sinergi antarperangkat daerah, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam mewujudkan program-program strategis yang telah dirancang, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten guna memastikan ketercapaian sasaran dan tujuan pembangunan.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra DKISP ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan daerah menuju transformasi digital yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tarakan, September 2025
Kepala Dinas

ENDAH SARASTININGSIH, S.Pd, M.Pd
NIP. 197010251994012001
Pembina / IVa